

**INDIKATOR KEMISKINAN DI  
DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Di ajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun Oleh:**

**Nadliful Hakim**

**NIM.12250074**

**Pembimbing:**

**Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS**

**NIP. 19740202 200112 1 002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DD/PP.00.9/01/2016

Tugas Akhir dengan judul : INDIKATOR KEMISKINAN DI DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADLIFUL HAKIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 12250074  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Mei 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
NIP. 19740202 200112 1 002

Penguji II

Dr. H. Waryono, M.Ag.  
NIP. 19701010 199903 1 002

Penguji III

Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.  
NIP. 19680610 199203 1 003

Yogyakarta, 17 Mei 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN  
Dr. Nurhannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nadliful Hakim

NIM : 12250074

Judul Skripsi : Indikator Kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta

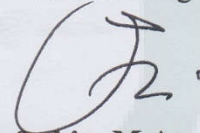
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/  
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Mei 2016

Pembimbing



**Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S**  
**NIP.197404202 2001 12 1 002**

Mengetahui

Ketua Prodi

Ilmu Kesejahteraan Sosial



**Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S**  
**NIP.197404202 2001 12 1 002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadliful Hakim  
NIM : 12250074  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: INDIKATOR KEMISKINAN DI DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2016

Yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
56F0FADF954438060

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

*Nadliful Hakim*  
Nadliful Hakim  
NIM.12250074

## Persembahkanku

Karya ini aku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Khusniah dan Muhammad Munir yang tak hentinya mengajarkan arti perjuangan dan kesederhanaan. Tak lupa Adikku satu-satunya, Hanif Amrullah yang telah menjadi partner menyenangkan di dalam keluarga.

Terkhusus untuk keluarga, sahabat-sahabat luar biasaku di Jogja; Frendy, Adil, Rian, Aat, Yusuf, Nanda dan Aldi atas bantuan support kalian. Semoga kita lekas bertemu di titik sukses masing-masing di masa depan.

Kawan-kawan seperjuanganku, tempatku berproses di kota yang menjadikan buku sebagai senjata, kota pendidikan; HMI Korkom UIN dan cabang Jogja, IKPI Jogja, Forkomkasi Jogja, HMJ-IKS Kepengurusan 2013, Kibar-Jogja, Dompot Dhuafa Jogja, keluarga IKS-B 2012 serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan saru-persatu. Terima kasih atas prosesnya.

Terima kasih atas semua proses, motivasi dan dukungan kalian semua, semoga Tuhan yang maha esa memberi rahmat berlipat ganda untuk kebaikan kalian.

I Love You all guys....

## Motto

*“Tidak ada masyarakat yang dapat maju dan berbahagia di tengah-tengah sebagian besar penduduknya yang berada dalam keadaan miskin dan menyedihkan”*

**(Adam Smith, 1776)**

*“Meskipun seluruh umat manusia menghuni satu planet yang sama, di planet itu sebenarnya ada dua dunia yang berbeda, yakni dunia kaya dan dunia miskin”*

**(Raanan Weitz, 1986)**

*“Banyaknya informasi tentang pembangunan yang kita miliki belum berarti apapun apabila kita belum memahami artinya”*

**(Denis Goulet, The Cruel Choice)**

*“Sedang mengetik prose, sedang memupuk passion dan sedang mencintainya.”*

**(Nadliful hakim, S.Sos)**

## KATA PENGANTAR

Penelitian ini didasarkan atas ketertarikan penulis terhadap isu-isu penanggulangan kemiskinan, terutama kajian yang bertalian erat dengan indikator kemiskinan. Sejak penulis mengambil mata kuliah Metopen Kualitatif di Prodi IKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kala itu diampu oleh Bu Astri Hanjarwati S.Sos, penulis telah mengajukan judul ini dalam tugas akhir UAS dan mendapatkan nilai sempurna kala itu.

Penelitian ini sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan sebuah model indikator kemiskinan yang penulis gagas sendiri. Penelitian ini menyajikan sebuah alternatif model indikator kemiskinan yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwasanya diskursus perihal gagasan takaran fakir dan miskin terutama dari kalangan Lembaga Amil Indonesia terhitung tidak ada. Model takaran miskin dapat dilihat hanya ada pada negara tetangga seperti Malaysia dengan menggunakan nama *Al-Had Kafihyah* (takaran kecukupan). Tentunya penelitian ini menjadi sebuah angin segar terhadap pemunculan isu ini.

Penulis menyadari bahwa tersusunya karya ini tidak lepas dari nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Swt. Selama ini, baik nikmat sehat, waktu, maupun segala nikmat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Penulis juga menyadari betul bahwa ada berbagai pihak yang turut membantu penyelesaian karya ini. Kepada semuanya,

penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya, diantaranya kepada; Bpk. Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS selaku ketua Prodi IKS sekaligus Dosen pembimbing, Bpk. Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis, Segenap pengurusan Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta. Sahabat-sahabat luar biasaku di Jogja yang senantiasa memberi masukan terhadap format karya ini, Frendy Mashuri S.Sos, Ega Harvaliani S.Sos,. Kedua orang tuaku serta seluruh pihak yang bersumbangsih dalam penyelesaian karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi karya referensi bagi mereka yang ingin melakukan kajian-kajian sejenis.

Yogyakarta, 2 Mei 2016

Hormat Penulis

**Nadliful Hakim**

**NIM.12250074**



## ABSTRAKSI

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standart tingkat hidup yang rendah, yaitu; adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ilmu-ilmu sosial pemahaman mengenai definisi kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator. Dengan adanya indikator, mereka yang tergolong sebagai orang yang berada dalam taraf kehidupan yang miskin dapat dikelompokkan sebagai suatu golongan yang dibedakan dari mereka yang tergolong tidak miskin. Dengan adanya indikator, maka jumlah siapa-siapa yang tergolong miskin dapat diketahui, untuk dijadikan kelompok sasaran intervensi.

Penelitian ini didasari atas asumsi bahwa lembaga penanggulangan kemiskinan harus memiliki sebuah pandangan tentang apa definisi kemiskinan. Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai lembaga Amil Zakat dimana salah satu fokus intervensinya tertuju pada kaum dhuafa juga termasuk dalam permaksudan ini. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan apa indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta serta bagaimana penerapannya secara umum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah para pengurus Dompot Dhuafa Yogyakarta. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah indikator kemiskinan itu sendiri. Metode pengumpulan data menggunakan desain *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pada teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisis data dilakukan melalui *reduksi, display* lalu *verification*.

Hasil penelitian menemukan bahwasanya; DDY memandang indikator kemiskinan melalui indikator kedhuafaan yang mereka terapkan dalam survey kedhuafaan. Berdasarkan temuan penulis, apabila variabel indikator kedhuafaan DDY dikomparasikan dengan beberapa pendekatan indikator kemiskinan (*expenditure*, keluarga sejahtera, *basic need* dan HDI), dapat ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan variabel. Sedangkan porsi terbanyak pendekatan yang sesuai dengan indikator kedhuafaan DDY adalah pendekatan keluarga sejahtera.

Pada bagian penutup peneliti memberi masukan agar DDY lebih merigidkan tiap variabel baik dari segi tujuan maupun pendekatan yang dianut dalam indikator kemiskinan melalui dokumen. Sedangkan bagi para akademisi, penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya fokus pada implementasi secara studi kasus indikator kedhuafaan DDY

**Keyword:** Taraf hidup, Indikator kemiskinan, Indikator kedhuafaan, DDY.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Surat Persetujuan Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Keaslian .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Motto .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstraksi .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
BAB I: Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kajian Pustaka .....	14
E. Kerangka Teori .....	27
F. Metode Penelitian .....	38
G. Sistematika Pembahasan .....	45

BAB II: Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Penanggulangan Kemiskinan .....	46
A. Program Penanggulangan Kemiskinan .....	47
1. Bidang Ekonomi .....	47
a. Program Warung BERES .....	48
b. Program Kampung Ternak .....	50
c. Program SAKOFA .....	51
d. Program MUI .....	52
2. Bidang Pendidikan .....	53
a. Program Guru Inspiratif .....	54
b. Program Sanggar Belajar Rakyat .....	55
c. Program Beasiswa Bintang .....	56
3. Bidang Kesehatan .....	57
a. Program ALS .....	58
b. Program POS Sehat .....	58
c. Program Gerai Sehat .....	59
d. Program Thibbun Nabawi .....	59
4. Bidang Dakwah dan Sosial .....	59
a. Program Masjid Berdaya .....	59
b. Program Pondok SMART .....	60
c. Program Layanan Mustakhik .....	60
d. Program Kebencanaan .....	60

B. Sifat dan Model Program Penanggulangan Kemiskinan di DDY .....	61
1. Program Caritas .....	62
2. Program <i>Empowerment</i> .....	63
3. Program Insidental .....	64
C. Bentuk dan Tempat Program .....	65
BAB III: Variabel-variabel Dalam Indikator Kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	70
A. Golongan Fakir dan Miskin Menurut Dompot Dhuafa .....	72
B. Survey Kedhuafaan DDY .....	76
1. Surveyor DDY .....	77
2. Variabel-variabel Kriteria Dalam Survey Kedhuafaan DDY .....	80
a. Variabel Kriteria Penghasilan .....	82
b. Variabel Level Kesejahteraan .....	86
c. Variabel Tanggungan Keluarga .....	93
d. Variabel Aktivitas Sosial .....	95
C. Indikator Kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	98
D. Penentuan Dhuafa/Mustakhik di Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	109
E. Penggunaan Indikator Kedhuafaan di Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	115
BAB IV: Penutup .....	120
A. Kesimpulan .....	120
Daftar Pustaka .....	124

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	32
Tabel 1.2 .....	34
Tabel 1.3 .....	36
Tabel 2.1 .....	63
Tabel 2.2 .....	64
Tabel 2.3 .....	65
Tabel 2.4 .....	65
Tabel 3.1 .....	82
Tabel 3.2 .....	84
Tabel 3.3 .....	87
Tabel 3.4 .....	87
Tabel 3.5 .....	88
Tabel 3.6 .....	90
Tabel 3.7 .....	92
Tabel 3.8 .....	94
Tabel 3.9 .....	96
Tabel 3.10 .....	100
Tabel 3.11 .....	106
Tabel 3.12 .....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	4
Gambar 3.1 .....	119



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik yang hampir ada di seluruh negara di dunia terutama di negara-negara berkembang dengan tingkat standar hidup yang cukup rendah.<sup>1</sup> Permasalahan ini bersifat kompleks dan selalu aktual. Bersifat kompleks karena sampai saat ini banyak kalangan, mulai dari para akademisi sampai para praktisi berusaha menyingkap tirai di balik fenomena kemiskinan dengan mengemukakan berbagai teori, konsep dan pendekatan untuk menaggulangi permasalahan kemiskinan. Dikatakan aktual karena kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat fluktuatif dan dinamis, selalu berubah-ubah dan tidak menentu, hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan di negara manapun yang selalu berubah-ubah di tiap periode.

Pada hakikatnya kemiskinan adalah bentuk permasalahan sosial yang telah banyak menyita perhatian seluruh kepala negara di dunia. Singkatnya, upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi sebuah agenda penting. Menurut *Human Development Report 1995*, sebesar 1,3 milyar penduduk di

---

<sup>1</sup> Perbedaan karakteristik antara negara berkembang dan maju dapat dilihat dari segi pembangunan sosialnya. Lihat Edi Suharto, “Potret Kemiskinan Dan Pembangunan Sosial Di Dunia”, Jurnal kebijakan 2010, [www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_37.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_37.htm)., diakses pada tanggal 23 November 2015.

negara berkembang hidup dalam kondisi kemiskinan, dan hampir 800 juta diantaranya menderita kekurangan pangan.<sup>2</sup> Maka tidak mengherankan jika kemiskinan merupakan permasalahan yang dianggap serius di seluruh belahan dunia manapun. Salah satu bentuk dari keseriusan ini telah dimulai dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York pada September tahun 2000 silam.<sup>3</sup> Dalam konferensi tersebut dilakukan pembahasan untuk melahirkan sasaran pembangunan.

Para pemimpin dunia sepakat untuk membahas perihal bentuk kemitraan global untuk mengurangi angka kemiskinan *absolute* dengan merumuskan sasaran terikat waktu sampai pada tahun 2015 yang kemudian disebut *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada MDG's memuat 8 butir sasaran. Pada butir pertama tertulis upaya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan.<sup>4</sup> Bahkan dengan bergantinya MDG's ke SDG's sejak 2015, permasalahan kemiskinan tetap menjadi agenda penting di dalamnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Data kemiskinan di negara berkembang secara berkala dirilis oleh UNDP. Lihat United Nation Development Program (UNDP), *Human Development Report (1995)*.

<sup>3</sup> Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2000 menghasilkan sasaran pembangunan MDG'S. Lihat Milenium Development Goals UNDP, "*United Nation Declaration*", [www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg\\_goals.html](http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals.html), diakses pada tanggal 24 Desember 2015.

<sup>4</sup> Penentuan butir-butir MDG's telah ditentukan oleh para peserta Konferensi Tingkat Tinggi pada tahun 2000 yang meletakkan "*no proverty*" dalam teks *Blue Print Melenium Development Goals* di Newyork city sebagai target pertama. Lihat *Blue Print MDG's* butir pertama.

<sup>5</sup> Pada tahun 2015 UNDP mengeluarkan sasaran pembangunan pengganti *Milineum Goals* yaitu *Sustainable Development Goals*, dimana masih meletakkan "*no proverty*" pada target utama. Lihat Sustainable Development Goals (SDG's), "*what are Sustainable Goals?*", [www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html](http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html), diakses pada tanggal 24 Desember 2015.



Singkatnya, ini mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat universal karena dirasakan oleh seluruh bangsa di dunia.

Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi miskin, atau kemiskinan itu sendiri digambarkan dan didefinisikan?. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan sering kali diidentikkan dengan standar hidup yang rendah. Michael P. Todaro menyatakan dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*:

“...bahwa negara-negara berkembang, terutama yang berada di kawasan Afrika, Asia dan Amerika latin mempunyai beberapa ciri khas khusus terkait permasalahan ekonomi yaitu: (1) standart hidup yang rendah; (2) produktifitas yang rendah; (3) tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan tinggi; (4) tingkat pengangguran yang tinggi; (5) ketergantungan pada produksi pertanian dan barang ekspor primer, dan; (6) dominasi ketergantungan dan kepekaan yang besar dalam hubungan internasional.”<sup>6</sup>

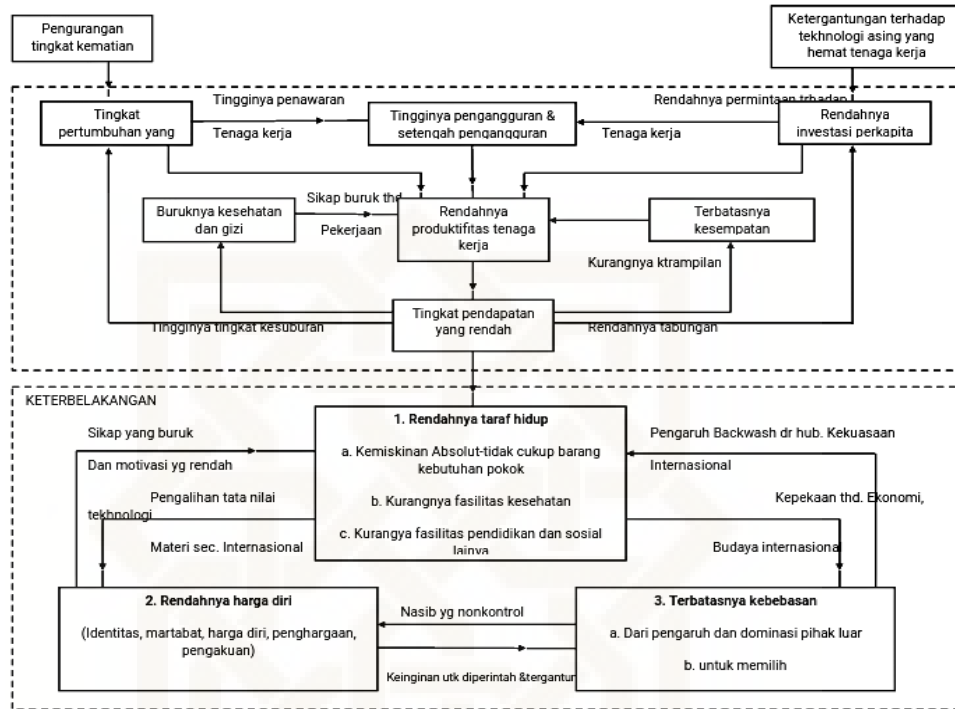
Dari poin-poin di atas, menggambarkan bahwa negara-negara berkembang (miskin) memiliki beberapa persamaan keterbelakangan. Keenam poin diatas merupakan poin-poin fundamen dalam membentuk kondisi keterbelakangan yang memicu kepada kemiskinan.

Gambar 1.1 di bawah ini adalah bentuk skematik untuk melukiskan dan meringkaskan beberapa aspek ekonomi dan non-ekonomi tentang kondisi keterbelakangan yang memicu pada kemiskinan.

---

<sup>6</sup> Todaro memberikan pemahaman bahwa apabila dianalisis dengan menggunakan kerangka yang sama, maka negara-negara berkembang (miskin) mempunyai persamaan secara umum dari segi ciri-ciri perekonomian, terutama di kawasan Afrika utara, Asia dan Amerika Latin. Lihat Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Negara-negara Dunia Ketiga*, terj. Burhanuddin Abdullah (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1994), hlm.28.

**Gambar 1.1: Kerangka Skematis Tentang Keterbelakangan**



Sumber : Keterbelakangan: Sebuah kerangka skematis yang buat oleh Michael P. Todaro tentang terciptanya keterbelakangan yang berawal dari taraf hidup rendah.<sup>7</sup>

Pada gambar di atas dapat dilihat panah-panah yang menunjukkan garis sebab-akibat secara umum. Berdasarkan proses terbentuknya kondisi kemiskinan pada Gambar 1.1, kondisi terbelakang menjadi sebuah fenomena yang sulit untuk dihindari terutama dari golongan-golongan yang berada di dalam pusaran skema sebab-akibat di atas. Konteks semacam ini sesuai dengan istilah perangkap kemiskinan atau *deprivation trap*. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5)

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.94.

ketidakberdayaan.<sup>8</sup> Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkat kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Singkatnya, penyebab terjadinya keterbelakangan yang mendorong pada kondisi miskin secara bersama-sama pada Gambar 1.1 menunjukkan seluruh penyebab determinan kemiskinan tertuju pada *keyword* “taraf hidup”. Maka jelaslah bahwa tanpa meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, masa depan penanggulangan kemiskinan sama sekali tidak ada. Dengan demikian, prioritas pertama untuk pindah dari keadaan keterbelakangan yang kronis ke suatu kemajuan haruslah dimulai dengan peningkatan “taraf hidup”.<sup>9</sup> Karena seyogyanya dengan insentif meningkatkan taraf hidup golongan miskin, maka disanalah letak rantai kemiskinan dapat diputus.

Disinilah pendefinisian tentang taraf hidup membutuhkan sebuah instrumen pasti untuk mengetahui secara jelas kondisi masyarakat yang dianggap sebagai golongan terbelakang. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah usaha untuk membuat pengukuran yang berperan sebagai metode operasional untuk menggambarkan taraf hidup masyarakat. M. P. Todaro sendiri

---

<sup>8</sup> Dr. Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya* (Malang: In-Trans Publishing Wisma Kali Metro, 2013), hlm.12.

<sup>9</sup> Melalui bentuk skematis kondisi keterbelakangan, Todaro memaparkan dalam bukunya “*pembangunan ekonomi Dunia Ketiga*” bahwa titik temu upaya penanggulangan kemiskinan adalah memutusnya rantainya melalui insentif peningkatan taraf hidup golongan miskin. Lihat, Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Negara-negara Dunia Ketiga*, terj. Burhanuddin Abdullah (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 1994), hlm.96.

mengatakan penggambaran semacam ini dalam bentuk indikator sosial.<sup>10</sup>

Lebih lanjut Todaro menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya indikator sosial dibuat dalam rangka melakukan dua motif, yaitu: (1) mengukur pembangunan dari pola interaksi antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik secara normal atau optimal; (2) untuk mengukur pembangunan dari sisi kualitas hidup”.<sup>11</sup>

Dari pernyataan di atas, penentuan kondisi miskin membutuhkan definisi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Salah satu bentuk upaya ini adalah dengan menentukan instrumen pengukuran kemiskinan baik dalam bentuk data mikro maupun makro.<sup>12</sup> Pengukuran kemiskinan dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian kepada golongan yang dianggap miskin. Data kemiskinan yang baik dan tepat dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka yang tergolong miskin.<sup>13</sup> Instrumen tersebut dapat digunakan untuk menginterpretasikan kondisi kemiskinan sebagai landasan untuk mendefinisikan kemiskinan.

---

<sup>10</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Negara-negara Dunia Ketiga*, terj. Burhanuddin Abdullah (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 1994), hlm.110.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Data kemiskinan makro dan mikro menyangkut pada ruang lingkup data kemiskinan disajikan. Lihat Badan Pusat Statistik, *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial* (Jakarta: 2011), hlm.05.

<sup>13</sup> Suparlan Pasurdi, *Kemiskinan Di Perkotaan* (Jakarta: Sinar harapan, 1985), hlm.12.

Menurut *World Bank Institute*, ada 4 alasan mengapa kemiskinan diukur. *Pertama*, adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, maka orang miskin akan mudah terlupakan. *Kedua*, orang harus mampu mengidentifikasi orang miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. *Ketiga*, adalah untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek atau kebijakan intervensi yang diarahkan kepada orang miskin. Dan terakhir, adalah untuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>14</sup>

Dalam membicarakan bagaimana indikator kemiskinan ditentukan, penentuan indikator kemiskinan tergantung pada subjek atau pelaku yang merumuskan indikator kemiskinan. Salah satu penelitian mengenai indikator ini pertama diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Perkembangan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Research Institute On Social Development UNRISD*) pada tahun 1970.<sup>15</sup> Kajian dipusatkan pada analisis hubungan antara indikator-indikator tersebut dengan berbagai tahapan pembangunan. Hasilnya adalah suatu susunan indeks pembangunan dengan indikator-indikator sosial dan ekonomi lebih nyata dan lebih menggambarkan tingkat kemiskinan pada tataran mikro dan regional dengan penggunaan

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial* (Jakarta: 2011), hlm.04.

<sup>15</sup> UNRISD, *Content and Measurements of the socioeconomic Development* (Geneva: United Nation Research On Social Development, 1970).

GDP/GNP. Maka dipilih 16 indikator (9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi).<sup>16</sup>

Namun, adanya studi tentang indikator diatas memunculkan beberapa kritik karena orientasinya untuk mengukur *visible* dan perubahan struktural, bukan berdasarkan pada kesejahteraan manusia. Misalnya, penggunaan GNP/GDP perkapita sebagai ukuran pembangunan memunculkan beberapa keberatan terhadap ukuran tersebut karena selain penggunaan tersebut mencakup kondisi yang terlalu luas dalam skala makro,<sup>17</sup> juga antara lain karena kegagalan untuk memasukkan ke dalamnya sesuatu yang subsisten yang tidak dapat dipasarkan (tidak mempunyai harga), sehingga tidak dapat memasukkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kondisi kesejahteraan dan distribusi pendapatan dalam lingkup yang lebih kecil (mikro).

Konteks diatas dapat ditengarai karena perbedaan pendekatan. Pendekatan dalam menentukan tingkat kemiskinan akhirnya memiliki beberapa opsi, seperti untuk menghitung tingkat materi ekonomi, tingkat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.63.

<sup>17</sup> GNP (*Gross National Product*) atau Produk Nasional Bruto merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, hampir sama dengan GDP/PDB namun GNP memasukkan produksi warga negara yang tinggal di luar negara. Lihat Awan Santosa, *Ekonomi Kerakyatan: Urgensi, Konsep, Dan Aplikasi, Sebuah Mimpi Dan Peta Jalan Bagi Kemandirian Bangsa* (Yogyakarta: Sentra Ekonomi Kerakyatan, 2010), hlm.9.

pembangunan manusia, maupun untuk skala yang lebih kecil seperti keluarga atau kesejahteraan mikro.<sup>18</sup>

Di era postmodern sekarang ini munculnya asumsi bahwa kapasitas *state* sebagai subjek pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti pertumbuhan, kesetaraan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa elemen institusional di sekitarnya. Misalnya, karena norma, ide maupun hubungan kekuasaan antar aktor yang mempunyai capaian-capaian yang diinginkan sendiri.<sup>19</sup> Hal semacam ini erat kaitanya dengan pendekatan *institutionalism*. Dengan kata lain pendekatan ini seringkali memiliki pijakan dan penjelasan yang berbeda antara institusional satu dengan institusional yang lain. Dalam kaitanya dengan ini, model indikator kemiskinan juga telah terinstitusionalkan oleh lembaga-lembaga yang merilis model indikator tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan dari masing-masing institusi.

Beberapa lembaga tersebut seperti *United Nation Development Program* (UNDP) mengeluarkan Indikator kemiskinan untuk mengukur angka kemiskinan yang disebutnya dengan HDI (*Human Development Index*).<sup>20</sup> Ada

---

<sup>18</sup> Maimun Sholeh menggambarkan model-model penghitungan kemiskinan yang secara umum dilakukan oleh lembaga-lembaga institusional dengan menentukan instrumen indikator kemiskinan seperti milik PBB, BPS dan BKKBN. Lihat, Maimun Sholeh, "Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya", *Jurnal prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*, edisi ke-23 (Desember, 2011)., hlm. 8.

<sup>19</sup> Nanang Indra Kurniawan, *Globalisasi Dan Negara Kesejahteraan Perspektif Institusionalisme* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), Hlm.17.

<sup>20</sup> UNDP, *Human Development Index*, [www.hdrundp.org/en/content/human-development-index-hdi](http://www.hdrundp.org/en/content/human-development-index-hdi), Diakses pada tanggal 24 Desember 2015.

pula *WorldBank* dengan menghitung *Exspenditure* (pengeluaran) yaitu menakar pendapatan perkapita/perhari sebagai standart minimum penghasilan (*garis kemiskinan*).<sup>21</sup>

Dalam lingkup Negara Indonesia<sup>22</sup> terdapat BPS<sup>23</sup> yang memiliki kewenangan dari segi undang-undang.<sup>24</sup> BPS mempunyai konsekwensi logis untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang statistik dan penyediaan data termasuk data kemiskinan.<sup>25</sup> Model penghitungan yang digunakan oleh BPS mengadopsi konsep Sayogyo, dengan mendikotomikan kebutuhan makanan dan non makanan<sup>26</sup> dan widyakarya 1998 tentang kalori kebutuhan makan<sup>27</sup> Data-data tersebut secara *sustainable* selalu diupdate oleh BPS melalui web resminya secara berkala melalui *Survey Sosial Ekonomi Nasional*.<sup>28</sup>

---

<sup>21</sup> Sulistyو Budi, *MDG's sebentar lagi, sanggupkah kita menghapus kemiskinan di Dunia?*(Jakarta: KOMPAS, 2010), hlm.xvii.

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik, “Angka kemiskinan di Indonesia”,[www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494](http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494), diakses pada tanggal 14 Desember 2015.

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik, “Tentang BPS”,[www.bps.go.id/index.php/masterMenu/view/id/1#masterMenuTab4](http://www.bps.go.id/index.php/masterMenu/view/id/1#masterMenuTab4), diakses pada tanggal 25 Maret 2015.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus, pasal 2 ayat (1).

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik, pasal 2 ayat (2).

<sup>26</sup> Hadikusumo Harttono, *Perangkap Kemiskinan: Problem Dan Strategi Pengentasanya Dalam Pembangunan Desa*(Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm.3.

<sup>27</sup> Widyakarya,“gizi dan pangan”, [www.wnpg.lipi.go.id](http://www.wnpg.lipi.go.id), Diakses pada tanggal 23 Desember 2015.

<sup>28</sup> Katalog BPS, *Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan*(Jakarta Utara: BPS, 2007), hlm.6.



Ada pula BKKBN dengan indikator kesejahteraannya sesuai dengan program keluarga Berencana (KB) dengan motto “*Keluarga yang Berkualitas*”.<sup>29</sup> Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan pendataan klasifikasi tingkat kesejahteraan.<sup>30</sup> Dari seluruh institusi yang telah disebutkan diatas baik UNDP, BPS atau BKKBN, masing-masing mempunyai visi, misi, tujuan dan capaian yang berbeda-beda. Di sinilah letak pendekatan *institutionalism* terhadap penentuan indikator kemiskinan terjadi.<sup>31</sup>

Permasalahannya adalah jarang sekali indikator kemiskinan yang dirilis kalangan *non-Government* lokal. Konteks ini menunjukkan hegemoni indikator kemiskinan terutama dari kalangan *Government* lebih banyak menjadi acuan. Oleh karena itu dorongan terhadap munculnya indikator kemiskinan dari kalangan *non-Government* lokal perlu digalakkan.

Salah satu *non-Government* yang bergerak dalam isu kemiskinan adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa merupakan lembaga non-profit yang mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia dari golongan dhuafa melalui pengalokasian dana ziswaf dari

---

<sup>29</sup> BKKBN, “Profil, visi-misi dan target BKKBN”, [www.bkkbn.go.id/home.aspx](http://www.bkkbn.go.id/home.aspx), diakses pada tanggal 22 November 2015.

<sup>30</sup> Ade Cahyat, dkk., *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga (Sebuah Panduan Dengan Contoh Kutai Barat, Indonesia)*(Bogo Barat: Center For International Forestry Research: 2007), hlm.2.

<sup>31</sup> Nanang Indra Kurniawan, *Globalisasi Dan Negara Kesejahteraan Perspektif Institusionalisme* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hlm.16.

perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.<sup>32</sup> Dana ziswaf yang di alokasikan kepada dhuafa merupakan sebuah gagasan tentang sebuah manajemen galang dana kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib *fuqara* dan *masakin*<sup>33</sup> dengan menggunakan asas-asas dan jalan ijtihadi sesuai dengan hukum agama Islam.<sup>34</sup>

Termin terpenting dalam penelitian ini adalah memberikan opsi indikator kemiskinan *non-Government* (Dompot Dhuafa). Seperti telah dikemukakan di muka bahwasanya diskursus mengenai indikator kemiskinan lebih banyak telah dipakemkan oleh *Government*. Namun tidak sedikit asumsi yang mengatakan bahwa implementasi model indikator tersebut tidak benar-benar dapat menginterpretasikan kondisi miskin terutama dalam tataran auditing kemiskinan.<sup>35</sup> Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi opsi kebijakan yang bersifat *Bottom Up* tentang bagaimana model Indikator kemiskinan dari kalangan *non-Government* dapat membantu upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Maka dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta serta kaitanya dengan

---

<sup>32</sup> Dompot Dhuafa, “Profil Lembaga”, [Http://Djogja.Org/Program](http://Djogja.Org/Program), di akses pada tanggal 10 Oktober 2015.

<sup>33</sup> Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dompot Dhuafa.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bambang Edi Prasetyo Selaku Manajer Pendayagunaan Zakat di Dompot Dhuafa Yogyakarta pada 5 Otober 2015.

<sup>35</sup> “Data Dituding Tak Valid, Ini Jawaban BPS”, [www.jawapos.com/read/2015/11/25/11718 /-data-dituding-tak-valid-ini-jawaban-bps](http://www.jawapos.com/read/2015/11/25/11718/-data-dituding-tak-valid-ini-jawaban-bps), diakses pada tanggal 1 Desember 2015.

indikator-indikator yang telah dipakemkan sebelumnya oleh lembaga-lembaga mandiri lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model Indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Selain itu secara lebih eksplisit penelitian ini akan membahas tentang:

1. Apa indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta?
2. Bagaimana penggunaan indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini akan meneliti tentang model indikator kemiskinan. Di mana secara lebih mendalam tujuan penelitian akan terfokus kepada pembahasan:

- 1. Tujuan yang ingin dicapai**
  - a. Untuk mengetahui bagaimana model Indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui penggunaan indikator kemiskinan tersebut.

Sedangkan dalam kegunaanya penelitian ini memiliki manfaat teoritis serta manfaat praktis yaitu:

## **2. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah diskursus pengembangan model indikator kemiskinan dari kalangan *non-Government*. Hal ini dikarenakan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang harus dilakukan secara terarah, terperinci dan sistematis agar dapat menyalurkan bantuan secara tepat.

## **3. Manfaat Praktis**

- a. Pendeskripsian indikator kemiskinan *non-Government* dapat menjadi referensi kalangan akademis dan lembaga institusional lainnya perihal model indikator kemiskinan.
- b. Menjadi referensi terkait pada sektor mana sajakah indikator kemiskinan digunakan dan diterapkan.

## **D. Kajian Pustaka**

Beberapa penelitian terkait, umumnya juga membahas mengenai Indikator kemiskinan namun dengan tujuan, metode dan objek yang berbeda-beda. Sebagian telah menetapkan indikator kemiskinan berdasarkan indikator yang telah di tentukan oleh peneliti itu sendiri, dan sebagian mengikuti indikator kemiskinan dari lembaga-lembaga yang telah mandiri seperti

BPS atau UNDP. Sedangkan, penelitian yang khusus membicarakan perihal indikator kemiskinan di lembaga *non-Government* seperti Dompet Dhuafa masih sangat jarang. Penelitian di Dompet Dhuafa sendiri kebanyakan berbicara untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi program di Dompet Dhuafa.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan studi literatur di lima universitas terbaik di Indonesia melalui laman web OPAC perpustakaan di masing-masing universitas yang berkaitan dengan (*Keyword: Indikator Kemiskinan*). Universitas-universitas tersebut diantaranya adalah ITB, IPB, UI, UGM dan UNPAD. Kelima universitas ini adalah lima universitas terbaik menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan (Kemristek Dikti) pada tahun 2015 dalam bidang kategori perguruan tinggi terbaik berdasarkan kualitas penelitian dan publikasi.<sup>37</sup>

Pada studi literatur di Institute Technology Bandung (ITB) peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas tentang indikator kemiskinan,<sup>38</sup> diantaranya yaitu; penelitian oleh Aji Supriyanto yang berjudul "*Rekayasa Informasi Penentuan Kemiskinan BPS Dengan Model Single-*

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pak Bambang, kepala leader manajer pendayagunaan zakat di Dompet Dhuafa Yogyakarta, 5 Oktober 2015.

<sup>37</sup> Sinaga Royke, "Universitas terbaik di Indonesia menurut Kemristek Dikti", [www.antaraneews.com/berita/513728/kemristek-dikti-umumkan-peringkat-perguruan-tinggi-2015](http://www.antaraneews.com/berita/513728/kemristek-dikti-umumkan-peringkat-perguruan-tinggi-2015), diakses pada tanggal 29 November 2015.

<sup>38</sup> Institute Technology Bandung, "OPAK Institute Teknologi Bandung", <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=search>, diakses pada tanggal 29 November 2015.

*Criteria Dan Multi-Criteria*".<sup>39</sup> Kemudian penelitian oleh Kurnia Lismawatie yang berjudul "*Korelasi Hitungan Indeks Pembangunan Manusia dan Kondisi Kemiskinan Di Pematangsariantar*".<sup>40</sup> Penelitian oleh Endar Desri Kumala Dewi yang berjudul "*Studi Karakteristik Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antar Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dengan Indikator Utama IPM*".<sup>41</sup> Penelitian oleh Deden Syarifudin tentang "*Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat Dan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia: Wilayah Studi Kabupaten Ciamis*".<sup>42</sup> Dari seluruh literatur yang disebutkan diatas tidak ditemui sama sekali penelitian yang berusaha untuk menentukan secara independen garis kemiskinan yang disepakati, dengan kata lain menggunakan indikator kemiskinan lembaga lain sebagai alat analisis dan pembanding, bukan sebagai batu pijak untuk menentukan indikator kemiskinan.

---

<sup>39</sup> Aji Supriyanto, *Rekayasa Informasi Penentuan Kemiskinan BPS Dengan Model Single-Criteria Dan Multi-Criteria*, Tesis (Bandung: Central Library Institute Technology Bandung, 2014). ISBN 978-602-17488-0-0.

<sup>40</sup> Kurnia Lismawatie, *Korelasi Hitungan Indeks Pembangunan Manusia Dan Kondisi Kemiskinan Di Pematangsariantar*, Skripsi (Bandung: Central Library Institute Technology Bandung, 2007).

<sup>41</sup> Endar Desri Kumala Dewi, *Studi Karakteristik Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antar Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dengan Indikator Utama IPM*, Tesis (Bandung: Regional and City Planning Study Programme, 2008).

<sup>42</sup> Deden Syarifudin, *Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat Dan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia: Wilayah Studi Kabupaten Ciamis*, Tesis (Bandung: Development Studies, 2008).

Pada studi literatur di Universitas Indonesia (UI), peneliti menemukan dua penelitian yang membahas tentang Indikator Kemiskinan.<sup>43</sup> Diantaranya yaitu; Penelitian oleh Hamonangan Ritonga yang berjudul “*Perkembangan Indikator Kemiskinan Dan Ketenagakerjaan Tahun 2004 Dan Prakiraan Tahun 2005-2006*”.<sup>44</sup> Dan; Penelitian oleh Kuspradoto Budi Jati yang berjudul “*Pengaruh Indikator Ekonomi Makro Regional Terhadap Kemiskinan Absolut (1976-202) Studi Kasus 26 Provinsi*”.<sup>45</sup> Pada penelitian pertama peneliti berusaha mengembangkan indikator kemiskinan dari perspektif BPS, sedangkan penelitian kedua bermaksud untuk mengetahui apakah kinerja ekonomi makro regional telah berperan dalam mengurangi kemiskinan masyarakat di daerah. Dari kedua penelitian diatas hanya penelitian pertama yang berusaha untuk merumuskan indikator kemiskinan walaupun menggunakan landasan perhitungan tingkat konsumsi milik BPS.

Peneliti menemukan literatur yang begitu kaya di opac IPB, ini menunjukkan bahwa universitas ini memberikan banyak sekali perhatian terkait dengan isu indikator kemiskinan.<sup>46</sup> Beberapa literatur yang peneliti

---

<sup>43</sup> Universitas Indonesia, OPAK Universitas Indonesia, <http://www.lib.ui.ac.id/hasilcari.jsp?lokasi=lokal&query=indikator+kemiskinan>, diakses pada tanggal 29 November 2015.

<sup>44</sup> Hamonangan Ritonga, “Perkembangan Indikator Kemiskinan Dan Ketenagakerjaan Tahun 2004 Dan Prakiraan Tahun 2005-2006”, *Jurnal Universitas Indonesia* (Januari, 2004).

<sup>45</sup> Kuspradoto Budi Jati, “*Pengaruh Indikator Ekonomi Makro regional terhadap kemiskinan absolut (1976-2002) studi kasus 26 provinsi*”, UI-Thesis (Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2002).

<sup>46</sup> Institute Pertanian Bogor, “OPAK IPB”, <http://repository.ipb.ac.id/discover?scope=%2F&query=indikator+kemiskinan&submit>, diakses pada tanggal 29 November 2015.

temukan, diantaranya; Penelitian oleh Ruspayandi yang berjudul “*Penskalaan Dimensi Ganda Dan Autokorelasi Spasial Ukuran Dan Indikator Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Profinsi Jawa Barat*”.<sup>47</sup> Hasil konfigurasi ukuran kemiskinan ekonomi di provinsi Jawa Barat menunjukkan ada karakteristik yang berbeda antara bentuk administrasi kota dan kabupaten, dimana bentuk kota cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Perbedaan antara kota dan kabupaten lebih jelas terlihat pada konfigurasi yang dibangun berdasarkan indikator kemiskinan non-moneter yang meliputi pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum. Dalam hal sebenarnya secara struktural telah terjadi pengelompokan nilai rendah atau tingginya kemiskinan antara kota dan kabupaten. Penelitian oleh Astutik Pudjirahayu yang berjudul “*Konsumsi Pangan Sebagai Indikator Kemiskinan*”.<sup>48</sup> Secara umum penelitian ini mengidentifikasi perubahan konsumsi pangan yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan. Penelitian yang dilaksanakan di Kab. Pasuruan ini memakai konsep BKKBN sebagai kerangka sampling. Selanjutnya dengan menggunakan kriteria BPS untuk mengukur garis kemiskinan minimum. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik konsumsi pangan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga tidak miskin relatif lebih baik dibanding

---

<sup>47</sup> Ruspayandi, *Penskalaan Dimensi Ganda Dan Autokorelasi Spasial Ukuran Dan Indikator Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Profinsi Jawa Barat*, Skripsi (Bogor: Program Studi Statistika, IPB, 2006).

<sup>48</sup> Astutik Pudjirahayu, *Konsumsi Pangan Sebagai Indikator Kemiskinan*, Tesis (Bogor: Program Pasca Sarjana IPB, 1999).



rumahtangga miskin. Jurnal Oleh Dadang Sukandar, Nani Sufiani, Lelly amalia dan Khairunnisa tentang “*Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan*”.<sup>49</sup> Terdapat hipotesa menarik dari peneliti yang menyatakan bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan sajoyo dan BPS terlalu rendah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan indikator dan *gold standart* garis kemiskinan baru berdasarkan pangan, gizi, pertanian dan sosial ekonomi di antara rumahtangga petani. Secara singkat peneliti menetapkan *gold standart* garis kemiskinan sebesar Rp.457.588/kapita/bulan.

Kemudian penelitian Oleh Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Saharrudin dan Alfiansari tentang “*Studi Indikator Kemiskinan Pada Masyarakat Dan Misklasifikasi Orang Miskin Menurut Kriteria BPS, Bank Dunia Dan Sajogyo*”.<sup>50</sup> Dalam konteks ini penelitian merumuskan *gold standart* garis kemiskinan yang baru dan menganalisis misklarifikasi orang miskin menurut BPS, *World Bank* dan Sajogyo. Dari hasil penelitian diperoleh *gold standart* sebesar Rp.544.019/kapita/bulan. Penelitian Oleh Hidayatul Kamil tentang “*Analisis Ukuran Kemiskinan Foster-Greer-Thorbecke Dari Sebaran Pendapatan Pareto Tipe 1*”.<sup>51</sup> Salah satu ukuran

---

<sup>49</sup> Dadang Sukandar dkk., “Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan”, *Jurnal Gizi dan Pangan IPB*, 3(2):94-100(Bogor, Juli, 2008).

<sup>50</sup> Ali Khomsan dkk., “Studi Indikator Kemiskinan Pada Masyarakat Dan Misklasifikasi Orang Miskin Menurut Kriteria BPS, Bank Dunia Dan Sajogyo”, *Jurnal Gizi Dan Pangan IPB*(Bogor: Juni 2011).

<sup>51</sup> Hidayatul Kamil, “Analisis Ukuran Kemiskinan Foster-Greer-Thorbecke Dari Sebaran Pendapatan Pareto Tipe 1”, *Jurnal Departemen Matematika IPB*, (Bogor: Juli, 2014).

yang dapat memberikan pemahaman terkait kemiskinan adalah ukuran kemiskinan FGT dianalisis berdasarkan sebaran pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa provinsi yang sebaran pendapatannya sesuai dengan model sebaran pendapatan. Penelitian oleh Wina Meylani tentang “*Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Sebagai Modal Kerja Terhadap Indikator Kemiskinan Dan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus: Program Iktiar Di Desa Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor)*”.<sup>52</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan program Iktiar terhadap indikator kemiskinan dan pendapatan perkapita *mustahiq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah tanggungan berpengaruh signifikan, namun berubah negatif dengan pendapatan perkapita *mustahiq*.

Kemudian penelitian Oleh Dr. Euis Sunarti, MS tentang “*Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*”.<sup>53</sup> Penelitian ini mencoba untuk memperkuat wacana mengenai keberlanjutan indikator kemiskinan keluarga sejahtera untuk menjadi pembahasan intensif di kalangan BKKBN. Naskah akademik disusun guna menyediakan ladsan teoritis mengenai indikator keluarga sejahtera.

---

<sup>52</sup> Wina Meylani, *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Sebagai Modal Kerja Terhadap Indikator Kemiskinan Dan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus: Program Iktiar Di Desa Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor)*, Tesis (Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi, IPB, 2009).

<sup>53</sup> Euis Sunarti, MS., *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*, ISBN 978-602-8665-05-6 (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2006).

Penelitian Oleh Neli Soraya tentang "*Analisis Gerombol K-Means Dan K-Error Untuk Pengelompokan Desa-Desa Di Jawa Barat Berdasarkan Indikator Kemiskinan*".<sup>54</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggerombolkan desa-desa di Jawa Barat berdasarkan indikator kemiskinan untuk mengetahui desa-desa mana saja yang perlu diberi bantuan. Metode penggerombolan K-Error dirasa dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode penggerombolan K-Means. Penelitian oleh Bagus Sumargo tentang "*Validitas Dan Reliabilitas Pengukuran Kemiskinan*".<sup>55</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung validitas dan reabilitas pengukuran kemiskinan berdasar model *measurement model*. Hasil kajian menyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengukur kemiskinan berdasarkan indikator subjektif dan objektif adalah *valid* dan *reliable*. Dari seluruh kajian literatur di IPB penelitian yang berusaha merumuskan indikator kemiskinan terdapat pada penelitian nomer 1,2,3,4,5 dan 9.

Pada Universitas Gadjah Mada (UGM), peneliti menemukan satu literatur penelitian yang konsen terhadap tema indikator kemiskinan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Neli Soraya, *Analisis Gerombol K-Means Dan K-Error Untuk Pengelompokan Desa-Desa Di Jawa Barat Berdasarkan Indikator Kemiskinan*, Tesis (Bogor: Departemen Statistika IPB, 2009).

<sup>55</sup> Bagus Sumargo, *Validitas Dan Reliabilitas Pengukuran Kemiskinan* (Bogor: Program Pasca Sarjana IPB, 2002).

<sup>56</sup> UGM, "OPAK Universitas Gadjah Mada (UGM)", <http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&self=1&op=opac>, diakses pada tanggal 29 November 2015.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Laksono, P.M. yang berjudul “*Indikator Kemiskinan Di Provinsi Maluku Dan Irian Jaya*”.<sup>57</sup> Penelitian ini merumuskan indikator kemiskinan yang sesuai dengan Provinsi Maluku dan Irian Jaya. Seperti halnya diketahui model pengukuran konsumsi BPS untuk orang miskin pedesaan adalah 360 kg beras/thn dan atau 2400 kalori/hari. Model ini dianggap tidak cocok dengan daerah Maluku dan Irian Jaya yang sering menggunakan sagu sebagai makanan pokok.

Sedangkan di Universitas Padjajaran (UNPAD), Peneliti tidak menemukan sama sekali literatur tentang indikator kemiskinan,<sup>58</sup> terutama yang berusaha merumuskan *gold standart* garis kemiskinan. Peneliti juga tidak menemukan sama sekali literatur yang secara khusus membahas indikator kemiskinan di perguruan tinggi dimana peneliti mengajukan penelitian ini, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian pertama kali di tataran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang Indikator Kemiskinan.<sup>59</sup>

Pembahasan-pembahasan lainnya tentang indikator kemiskinan dikalangan umum juga terdapat banyak sekali seperti penelitian: “*Indikator Kemiskinan Pada Penduduk Muda Di JABATEK*”, Oleh: Peter McDonald dan

---

<sup>57</sup> Laksono, P.M., *Indikator Kemiskinan Di Provinsi Maluku Dan Irian Jaya*, No. Klasifikasi: KKI, 362.5, Lak, i (Yogyakarta: Fakultas Sandra UGM, 1997).

<sup>58</sup> Universitas Padjajaran, “OPAK Universitas Padjajaran (UNPAD)” <https://cisral.unpad.ac.id/?s=indikator+kemiskinan>, diakses pada tanggal 29 November 2015.

<sup>59</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “OPAK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, [www.opac.uin.suka.ac.id/](http://www.opac.uin.suka.ac.id/), diakses pada tanggal 29 November 2015.

Iwu Dwisetyani Utomo (ANU).<sup>60</sup> Dalam konteks ini, Peneliti mempunyai ukuran yang disepakati untuk mengukur kemiskinan.

Sebuah instrumen pengukuran yang ditetapkan peneliti yaitu ukuran tentang standar kehidupan penduduk, peneliti menentukan tingkatan perihal bagaimana seseorang mempunyai standar kehidupan yang rendah. Data penelitian berasal dari survei transisi yang dilakukan di JABATEK kepada individu berusia 20-34 tahun.

Dalam kesimpulanya peneliti mengungkapkan bahwa pengukuran yang sederhana dari kemiskinan adalah jumlah dari kekurangan yang dimiliki seseorang (dari 14 indikator yang terpilih). Pengukuran kemiskinan yang dikembangkan penulis ini masih dalam taraf uji coba tetapi dari hasil analisa yang sudah dilakukan ada 14 indikator kemiskinan untuk individu yang dapat sangat terpercaya untuk mengukur kemiskinan, khususnya untuk penduduk dewasa muda (20-34 tahun).

Banyak pembahasan yang mengatakan bahwa pengukuran yang tepat dan akurat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pembarantasan kemiskinan di suatu negara. Seperti penelitian Ade Cahyat berjudul "*Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Pengukuran*

---

<sup>60</sup> Prof. Peter. McDonald and Dr. Iwu Dwisetyani Utomo, The 2010 Greater Jakarta Transition to Adulthood Survey Policy Background, "*Indikator Kemiskinan Pada Penduduk Muda Di JABATEK*", Policy Brief (Australia: Autralian Nastonanl University, 2010).

*Kemiskinan Di Indonesia)*".<sup>61</sup> Dalam pemaparannya penulis menyatakan bahwa tiap kabupaten yang mempunyai kekhasan tersendiri membutuhkan otonomi dalam menentukan indikatornya. Indikator ini akan membantu dalam tahap evaluasi dan monitoring di lapangan.

Ade Cahyat menjelaskan tiga pendekatan utama untuk menentukan ukuran kemiskinan yaitu milik BPS, BKKBN dan PBB. Namun dalam pemaparan selanjutnya penulis lebih mengkritisi bentuk desentralisasi pengukuran tersebut yang tidak sesuai dengan konteks budaya di tiap daerah di Indonesia. Lebih lanjutnya Ade Cahyat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk secara *independent* melakukan monitoring kemiskinan sesuai dengan konteks kedaerahan.

Penelitian lain yang menyatakan akan pentingnya otonomi pembuatan indikator kemiskinan adalah oleh Muhammad Natsir yang berjudul "*Indikator Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara*".<sup>62</sup> Tujuan Penelitian ini adalah untuk memetakan indikator-indikator utama penyebab kemiskinan dan secara rinci untuk mendapatkan informasi sejauh mana tingkat pencapaian indikator-indikator utama penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Dalam

---

<sup>61</sup> Ade Cahyat, "Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Pengukuran Kemiskinan Di Indonesia)", *Governance Brief* (Bandung: Center for International Forestry Research(CIFOR), 2004).

<sup>62</sup> Muhammad Natsir, "Indikator Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Jurusan Tata Niaga Universitas Politeknik Negeri Lhoksumawe*(Lhoksumawe: Januari, 2013).

pembahasan yang khusus membahas tentang Indikator di Kabupaten Aceh Utara, penulis memaparkan beberapa karakteristik permasalahan kemiskinan, kemudian mengambil kesimpulan penetapan indikator dalam 4 kategori yaitu; *pertama*, Pemenuhan hak dasar yang meliputi kesempatan kerja; akses pendidikan; akses layanan kesehatan; dan kecukupan mutu pangan. *Kedua*, Faktor sosial budaya meliputi: terhambatnya mobilitas sosial ke atas; rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi; dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi. dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi. *Ketiga*, Prasarana Wilayah, dan *keempat*, Degradasi sumber alam dan lingkungan hidup.

Kemudian, penelitian Nunung Nurwati yang berjudul “*Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan*.”<sup>63</sup> Dalam pemaparannya penulis berargumen bahwa bukan masalah model pengukuran dan pendekatan yang dipakai dalam menentukan instrumen kemiskinan, akan tetapi bagaimana kemiskinan ditentukan dari tahap *Assessment* untuk melihat dimensi dari kemiskinan melalui beberapa tahapan yaitu: Tahap *pertama*, melakukan diagnosis dan analisis tentang kemiskinan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan melakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat. Tahap *kedua*, adalah menentukan tujuan, target dan indikator yang ingin dicapai. Tahap

---

<sup>63</sup> Nunung Nurwati, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan”, *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, Vol.10, No.1 (Januari 2008:1-11).

*ketiga*, yaitu merancang dan mengimplementasikan program. Penulis menitikberatkan bahwa bukan model pengukuran yang menjadi masalah, namun tujuanlah yang menjadi titik utama. Seperti apabila tujuannya mengikuti MDG'S.

Dari keseluruhan literatur yang telah penulis analisis, maka penulis melihat beberapa termin kesamaan dari seluruh literatur yang dipaparkan di muka. Oleh karena itu penulis menarik dua garis besar klasifikasi dari beberapa studi literatur di atas, yaitu: *pertama*, penelitian yang mencoba mendeskripsikan, menganalisis dan membandingkan antara indikator kemiskinan yang telah mandiri terhadap kondisi lapangan, dan; kedua, penelitian yang mencoba untuk merumuskan indikator kemiskinan sesuai dengan konteks objek sasaran. Khusus jenis kedua dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu menentukan indikator berdasarkan garis kemiskinan kapital (*gold standart*), dan; menentukan indikator sesuai dengan konteks sosial di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan condong untuk mengikuti poin kedua opsi kedua.



## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai banyak definisi. Ada sebagian orang yang mendefinisikan kemiskinan dari segi *subjektif* dan *komparatif*, namun tidak jarang juga kemiskinan didefinisikan dari segi *moral* dan *evaluatif*.<sup>64</sup> Walaupun kemiskinan sering kali dikaitkan dengan aspek ekonomi berupa material, namun kemiskinan sejatinya juga menyangkut beberapa dimensi terkait sosial, kultural, institusional dan struktural bahkan dimensi psikologis. Dengan kata lain kemiskinan harus dicirikan secara multidimensional.<sup>65</sup> Ketidakmampuan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan ketidakberdayaan dalam hal ekonomi, sosial dan politik adalah poin-poin untuk melihat kemiskinan secara multidimensional.<sup>66</sup>

Konsep kemiskinan merupakan konsep yang abstrak, dapat dijelaskan secara berbeda tergantung pada sudut pandang dan ideologi yang dianut. Bila semula pengertian kemiskinan hanya ditentukan pada kurangnya kepemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan telah mengalami perluasan arti dengan menyentuh posisi individu dalam proses perubahan serta akses

---

<sup>64</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.15.

<sup>65</sup> Daud Bahransyaf, *Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan* (Yogyakarta: B2P3KS PRESS, 2012), hlm.3.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.4.

dalam politik. Dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi melalui ekonomi, sosial dan politik.<sup>67</sup>

a. Kemiskinan ekonomi/materil

Dimensi kemiskinan ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok orang miskin, dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya alam yang tersedia pada kelompok tersebut dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan.<sup>68</sup> Dari pengertian kemiskinan materil, dapat diartikan kurangnya pendapatan sekelompok orang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka.

b. Kemiskinan sosial

Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk meningkatkan produktifitas. Kemiskinan sosial disebabkan adanya faktor-faktor penghambat diantaranya adalah:

---

<sup>67</sup> Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*(Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, 1995), hlm. 248.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.249.

*Pertama*, faktor yang datang dari masyarakat itu sendiri. *Kedua*, faktor yang menghambat adalah dari diri seseorang atau kelompok masyarakat, seperti hambatan budaya atau *culture*.<sup>69</sup>

c. Kemiskinan politik

Kemiskinan politik menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*), kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya manusia untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi penggunaan sumber daya manusia. Cara mendapatkan akses itu dapat melalui sistem politik formal, kontrak informal dengan struktur kekuasaan, dan mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi.<sup>70</sup>

Dari ketiga klasifikasi di atas seluruh penyebab kemiskinan dapat ditengarai diakibatkan oleh dua aspek, yaitu: kemiskinan *struktural* dan kemiskinan *kultural*. Kemiskinan *Struktural* adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Sedangkan kemiskinan *kultural* adalah

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.251.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.252.

kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat.<sup>71</sup>

## 2. Tolok ukur/Indikator Kemiskinan

Dalam ilmu-ilmu sosial pemahaman mengenai definisi kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator. Dengan adanya indikator, mereka yang tergolong sebagai orang yang berada dalam taraf kehidupan yang miskin dapat dikelompokkan sebagai suatu golongan yang dibedakan dari mereka yang tergolong tidak miskin. Dengan adanya indikator, maka jumlah siapa-siapa yang tergolong miskin dapat diketahui, untuk dijadikan kelompok sasaran intervensi.<sup>72</sup> Sedangkan indikator kemiskinan sendiri memiliki beberapa pendekatan dalam menentukannya, diantaranya adalah:

### a. Pendekatan *Basic Need Approach*

Pendekatan ini pertama kali dipromosikan dan dipopulerkan oleh PBB melalui ILO (*International Labor Organization*) pada tahun 1976. Strategi kebutuhan dasar ini memberi penekanan langsung pada segi-segi kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari seperti tingkat konsumsi atau kebutuhan primer lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Badan pusat statistik, *Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan 2008* (Jakarta: Katalog BPS, 2008), hlm.5.

<sup>72</sup> Pasurdi Suparlan, *Kemiskinan di perkotaan* (Jakarta: Sinar harapan, 1985), hlm.20.

<sup>73</sup> Badan pusat statistik, *Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan 2008* (Jakarta: Katalog BPS, 2008), hlm.9.

Beberapa kelompok seperti *United Nation* dan BPS menggunakan pendekatan ini untuk mendefinisikan kemiskinan. Mereka telah merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Menurut *United Nations* komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. Sedangkan Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan non pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm.29.

**Tabel 1.1: Komponen Pengeluaran Penduduk**

Jenis Pengeluaran		Kota	Desa
a.	Pangan:		
	1. Padi-padian dan hasil lainnya	*	*
	2. Umbi-umbian dan hasil lainnya	*	-
	3. Ikan dan hasil ikan lainnya	*	*
	4. Daging	*	*
	5. Telur, susu dan hasil dr susu	-	-
	6. Sayur-sayuran	*	*
	7. Kacang-kacangan	-	*
	8. Buah-buahan	*	*
	9. Konsumsi lainnya	(*)	(*)
b.	-Non pangan:		
	1. Perumahan, penerangan, air	*	*
	2. barang dan jasa	(*)	(*)
	3. Pakaian, alas kaki, tutup kepala	*	*
	4. barang-barang tahan lama	*	*
	5. Keperluan pesta dan upacara	*	*

Tanda\* dipergunakan sepenuhnya dan tanda (\*) dipergunakan sebagian dari pengeluaran rata-rata jenis pengeluaran dalam kategori kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar.<sup>75</sup>

#### **b. Pendekatan *expenditure***

Pendekatan ini diidentikkan dengan menetapkan garis kemiskinan berupa *gold standart*.<sup>76</sup> Bahkan ada juga pengukuran secara internasional dengan menggunakan nilai uang dalam bentuk dolar. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar dua dolar dalam bentuk kapita/hari. Sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm.12.

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm.14.

kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pendapatan minimum sebesar Rp.600.000.

### c. Pendekatan Kesejahteraan Keluarga

Indikator ini melihat kebutuhan relatif per keluarga. Dimanabatasanya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna sebuah keluarga dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai dan layak. Lembaga yang mempopulerkan pendekatan ini adalah BKKBN.

BKKBN lebih melihat kemiskinan dari sisi kesejahteraan selain dari sisi materil. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu "*Keluarga yang Berkualitas*". Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan Pendataan Keluarga setiap tahun sejak 1994 dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan.<sup>77</sup> Indikator kesejahteraan dilakukan melalui level klasifikasi kesejahteraan, dimana tiap level memiliki taraf kesejahteraan yang berbeda-beda, yaitu:

---

<sup>77</sup> Malmun Sholeh, "Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya", *Jurnal prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta* (Januari, 2010).

**Tabel 1.2**

<b>Tahap Keluarga Sejahtera</b>
Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin)
Keluarga Sejahtera I (miskin)
Keluarga Sejahtera II
Keluarga Sejahtera III
Keluarga Sejahtera III Plus

Table 1.2: Tahap Keluarga Sejahtera<sup>78</sup>

**d. Pendekatan Pembangunan Manusia (HDI)**

Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh lembaga PBB melalui *United Nation Development Program* (UNDP). Laporan tentang Pembangunan *Human Development Report* (HDR) dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara. UNDP telah membuat definisi khusus mengenai pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*).<sup>79</sup> Dalam konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.

---

<sup>78</sup> Ade Cahyat Dkk, *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan Dengan Contoh Dari Kutai Barat, Indonesia*, (Bogor Barat: Center For International Forestry Research, 2007), hlm.8.

<sup>79</sup> Ade Cahyat, "Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Pengukuran Kemiskinan Di Indonesia)", *Governance Brief* (Center for International Forestry Research CIFOR: 2004).



Indikator-indikator dalam HDR dapat dikelompokkan ke dalam enam dimensi. HDI, HPI dan GDI menggunakan tiga dimensi yang sama, yaitu: Umur yang panjang dan hidup sehat; Pengetahuan; Standar hidup yang layak. Sedangkan indikator-indikator pada GEM menggunakan tiga dimensi yang berbeda yaitu: Partisipasi politik; Partisipasi dalam ekonomi dan pengambilan keputusan; Memiliki kekuatan dalam sumberdaya ekonomi. Secara lengkap indikator-indikator yang digunakan dalam HDR adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3: Instrumen Indikator Pembangunan Manusia**

Jenis	Indikator
HDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat harapan hidup</li> <li>• Tingkat melek huruf orang dewasa</li> <li>• Rata-rata lama bersekolah</li> <li>• Tingkat daya beli per kapita</li> </ul>
HPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun</li> <li>• Tingkat buta huruf orang dewasa</li> <li>• Persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan</li> <li>• Persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan</li> <li>• Persentase balita yang kurang makan</li> </ul>
GDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan</li> <li>• Tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan perempuan</li> <li>• Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan</li> <li>• Perkiraan tingkat pendapatan</li> </ul>
GEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan</li> <li>• Persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan perempuan</li> <li>• Perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan</li> </ul>

Tabel 1.4: Indikator-Indikator di dalam HDR.<sup>80</sup>

### 3. Filantropi Islam

Secara definitif istilah ini berasal dari bahasa Yunani *Philein* (cinta), dan *anthropos* (manusia). Jika di terjemahkan secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktek *giving*, *sevices* dan

<sup>80</sup> *Ibid.*,

*association* secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi kemanusiaan dan cinta sesama.<sup>81</sup>

Aspek kemanusiaan melalui *giving*, *sevices* dan *association* ini sesuai dengan prinsip kedermawanan. Yaitu merepresentasikan kesalehan sosial pada ranah sosial ekonomi dan politik. Era kekinian menunjukkan gerakan filantropi telah terlaksana secara terorganisir. Filantropi Islam misalnya, yang menggunakan dana zakat sebagai basis gerakan filantropi.<sup>82</sup> Evolusi aspek legal-formal filantropi Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU Zakat No.23 th.2011 yang menggantikan UU pengelolaan zakat th.1999 yang telah memberi angin segar terhadap gerakan filantropi Islam. Sebut saja BAZNA, BAZDA dan LAZ (lembaga amil zakat) lainnya. Singkatnya, Wacana serta gagasan untuk menerapkan hukum Islam menjadi hukum legal formil di Indonesia belakangan ini, bukanlah isu elitis yang dimunculkan oleh para politisi, melainkan didasarkan pada pertimbangan ideologis dan sosiologis masyarakat Islam Indonesia.<sup>83</sup> Selain itu juga didasari pada realitas kekinian di Indonesia.

---

<sup>81</sup> Wikipedia, "Filantropi", [www.id.m.wikipedia.org/wiki/filantropi](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/filantropi), diakses pada tanggal 4 April 2016.

<sup>82</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam Indonesia*(Yogyakarta: Ombak, 2013) hlm.6.

<sup>83</sup> Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan*(Yogyakarta:Madyan Press, 2002), hlm.28.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praksis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.<sup>84</sup> Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Namun disisi lain karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan indikator kemiskinan, maka perlu sebuah instrumen pendekatan penentuan indikator kemiskinan sebagai alat analisis.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.<sup>85</sup> Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.<sup>86</sup>

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat

---

<sup>84</sup> Anton H. Barkker, *Metode-metode filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.), hlm.6.

<sup>85</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian). Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 27.

<sup>86</sup> Sugiyono, *Memahami metode penelitian kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2008), hlm.30.

mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan Dompot Dhuafa sebagai subjek penelitian serta menggambarkan indikator kemiskinan di lembaga tersebut.

Rancangan penelitian disajikan dalam bentuk cerobong (*funnel*). Bentuk ini merupakan langkah sistematis yang berawal dari eksplorasi bersifat luas dan mendalam. Dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang lebih menyempit serta terarah pada suatu topik tertentu.<sup>87</sup> Penelitian ini lebih ditekankan memakai sifat narasi induktif.

## 2. Subjek Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta. Berdasarkan akta notaris lembaga tahun 2014, secara resmi lembaga ini mendapat status legal dengan nama Dompot Dhuafa Republik. <sup>88</sup> Dalam prosesnya Dompot Dhuafa berkembang melalui cabang-cabang di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya cabang Yogyakarta. Selanjutnya dalam penelitian ini subjek penelitian akan disebutkan peneliti dengan nama Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Subjek penelitian "*informan*" merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian.

---

<sup>87</sup> Narasi induktif adalah corak penelitian dari metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada hasil riset dari umum ke khusus. Lihat Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Renika Cipta, 2005), hlm. 51.

<sup>88</sup> Akta Notaris oleh Edi Priyono, S.H., SK. Menkeh dan HAM RI Lembaga Dompot Dhuafa, No. C-98-HT.03.02-Th.2002.

Dengan demikian subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Dompet Dhuafa Yogyakarta dengan *teoritical sampling* dimulai dari perancang survey indikator bagian pendayagunaan zakat Dompet Dhuafa, kemudian para surveyor yang mempraktekkan desain indikator tersebut, lalu cara terakhir akan dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* sebagai tahap kedalaman informasi yang dibutuhkan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah indikator kemiskinan di Dompet Dhuafa.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen yang harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik.<sup>89</sup>

Penelitian ini akan menggunakan, sampel sumber data yang dipilih secara *purposive sampling* kemudian dilanjutkan dengan *Snowball sampling*. Maksud dari teknik *Purposive sampling* ini adalah sebagai tahap awal dalam penelitian untuk mencari sistem sumber dan jumlah sampel yang dapat mewakili lapisan populasi dengan ciri-ciri esensial dari populasi sehingga bersifat representatif.<sup>90</sup> Sistem sumber pertama adalah

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Memahami metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.59.

<sup>90</sup> Nanik Kasniyah, *Tahapan Menentukan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.7.

yang memiliki *power* dan otoritas (*stakeholder* lembaga) pada objek yang diteliti, dengan kata lain paham dengan situasi sosial yang terjadi dan menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya.

Sedangkan *snowball sampling* dalam penelitian ini dijadikan sebagai strategi pengambilan sampel yang dikembangkan mengikuti rekomendasi.<sup>91</sup> Yakni peneliti memulai pengambilan sampel dengan menghubungi beberapa informan yang dijadikan sampel, kemudian informan tersebut memberi nama orang lain yang dianggap memiliki kriteria sesuai dengan tujuan penelitian dalam proyek penelitian.

Dalam penelitian ini dilihat dari settingnya pengumpulan data dapat dikumpulkan pada setting alamiah dan (*natural setting*), pertimbangannya karena subjek penelitian ini adalah *non-Government*.<sup>92</sup> Maka dari itu dalam pengumpulan data melalui metode wawancara akan dilakukan secara *indept interview*.

Bila dilihat dari sumbernya penelitian ini membedakan sumber data sebagai data *primer* dan data *sekunder*. Sumber *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber *sekunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan

---

<sup>91</sup> Jonet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*(Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.175.

<sup>92</sup> Sugiyono, *Memahami metode penelitian kualitaif* (Bandung: alfabeta, 2008), hlm.62.

data kepada pengumpul data.<sup>93</sup> Data *primer* dalam penelitian ini adalah stakeholder kunci dalam kepengurusan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Stakeholder kunci ini meliputi pimpinan cabang, manajer program dan para surveyor lapangan. Langkah ini dimaksudkan agar peneliti dapat mendeskripsikan subjek penelitian secara komprehensif dan menghindari prinsip parsial.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Metode wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>94</sup> Agar pengambilan data secara wawancara lebih nyaman maka peneliti membutuhkan alat bantu. Adapun alat bantu yang digunakan adalah handphone Lenono A6000 Plus yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan kamera dan alat perekam suara.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm.49-50.

<sup>94</sup> Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktek*(Jakarta: Reneka Cipta, 1990), hlm.127.



## **b. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>95</sup> Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan melalui teknik *non-participant*.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>96</sup> Dokumen yang dimaksud di sini adalah berupa penjelasan baik peristiwa yang bersifat pribadi atau rahasia maupun sifatnya birokratis dari institusi.

Termin utama dalam penelitian ini adalah indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Maka sumber data akan lebih tertuju pada stakeholder Dompot Dhuafa Yogyakarta yang secara langsung maupun tidak, turut serta dalam mengkonsepsi dan mempraktekkan, untuk kemudian dilakukan *snowball sampling* sebagai fungsi *verification*.

Setelah dilakukan pengumpulan data pada pengurus harian, peneliti akan melakukan pengumpulan data *primer* lanjutan kepada para tim surveyor yang mempraktekkan langsung di lapangan. Hal ini dimaksudkan sebagai fungsi verifikasi atas data yang telah diberikan oleh pengurus harian.

Lebih lanjut lagi untuk data *sekunder* akan dilakukan dengan melihat web Dompot Dhuafa, baik pusat maupun cabang. Selain itu penggunaan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Ibid.*,

dokumen Dompot Dhuafa yang dirasa dapat menjadi referensi yang berguna bagi upaya penelitian, maka upaya ini akan dilakukan.

#### 4. Analisis data

Menurut Miles dan Huberman analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verivication*. Sedangkan menurut Spradley dilakukan secara berurutan, melalui proses analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya.<sup>97</sup>

Data yang sudah terhimpun melalui teknik-teknik yang ada diatas, akan dianalisis secara indukif. Yakni, menarik kesimpulan dari yang khusus ke umum. Hal demikian dilakukan dengan cara mengklasifikasikan semua data secara sistematis. Selajutnya, data yang sudah terhimpun dan diklasifikasikan secara sistematis akan disaring dan disusun dalam kategori-kategori yang kemudian akan salingdihubungkan. Melalui proses inilah kesimpulan akan dibuat.<sup>98</sup> Tentunya data tersebut akan dianalisis sesuai dengan pedoman teori dalam penelitan. Dari hasil pengolahan data dan penganalisisan data ini kemudian diberi interprestasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm 89

<sup>98</sup> Matthew B. Milles dan Michael Huerman, *Analisis Data Kuntitatif*(Jakarta,: UI Press, 1992), hlm. 15-16.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara umum pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Dengan demikian diharapkan cara demikian diharapkan akan terbentuk sistem penulisan yang holistik.

*Bab Pertama*, adalah bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tentang gambaran umum aktivitas penanggulangan kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta

*Bab Ketiga*, membahas tentang indikator kemiskinan di Dompot Dhuafa Yogyakarta serta bagaimana penggunaannya

*Bab keempat*, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa simpulan tentang indikator kemiskinan dalam penelitian ini penulis sajikan dalam bingkai *institutionil* (kelembagaan) di Dompot Dhuafa Yogyakarta. kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya:

*Pertama;* secara umum Dompot Dhuafa Yogyakarta tidak merilis konsep indikator kemiskinan secara independen. Konteks seperti ini tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah mandiri dalam merilis indikator kemiskinan (BPS, BKKBN, UNDP dll.). Lembaga-lembaga tersebut secara tegas memiliki visi, konsep dan pendekatan yang teramat berbeda dalam mendefinisikan taraf hidup rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Dompot Dhuafa Yogyakarta secara konsep metodologi mengadopsi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut (BPS dan BKKBN). Beberapa variabel dan instrumen dalam indikator kedhuafaan Dompot Dhuafa Yogyakarta hampir telah dilakukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga di atas (BPS dan BKKBN).

Temuan peneliti menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan Dompot Dhuafa Yogyakarta tidak begitu saja memakai pendekatan yang ada

secara keseluruhan. Pemakaian pendekatan hanya berdasarkan kebutuhan lapangan. Tentunya pemakaian pendekatan yang berbeda beda juga dilakukan sebagai upaya maksimalisasi dalam mendefinisikan golongan dhuafa.

Pembahasan terpenting kiranya dalam penelitian ini adalah; temuan peneliti tentang apa yang di sebut sebagai indikator keimanan dalam indikator kedhuafaan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Diskursus semacam ini sama sekali tidak ditemui dalam indikator-indikator kemiskinan yang telah mandiri sebelumnya. Keseluruhan proses *copying*, pemilihan variabel dan intrumen dari beberapa pendekatan indikator kemiskinan (BPS, BKKBN), kemudian adanya indikator keimanan di Dompot Dhuafa Yogyakarta dikristalisasikan sehingga memunculkan apa yang dapat kita sebut sebagai indikator kedhuafaan Dompot Dhuafa Yogyakarta.

*Kedua*; penggunaan indikator kedhuafaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam lingkaran proses intervensi oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Penerapan indikator kedhuafaan ini dilakukan guna proses *skoring*. Proses *skoring* di sini dilakukan sebagai akumulasi keseluruhan variabel yang ada dalam indikator kedhuafaan.

Dalam segi proses, indikator kedhuafaan menempati tempat yang *sigificant*. Indikator kedhuafaan berguna sebagai alat untuk melakukan survey terhadap calon *mustakhik*. Survey calon *mustakhik* ini menggunakan seluruh

variabel dan instrumen yang ada dalam indikator kedhuafaan. Dalam prosesnya pula indikator kedhuafaan ditempatkan sebagai bagian yang harus dievaluasi oleh lembaga terutama pada evaluasi akhir tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan yang telah penulis temukan terdapat dua saran yang peneliti ajukan. Saran ini penulis tujukan untuk Dompot Dhuafa Yogyakarta dan untuk kalangan akademisi.

*Pertama;* untuk Dompot Dhuafa Yogyakarta, penulis sampaikan bahwasanya upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang harus dilakukan secara terarah dan sistematis. Hal ini senada dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Pada konteks indikator kemiskinan apabila kita melihat sebagai bagian dari upaya perencanaan intervensi seharusnya juga menempati bagian yang tidak kalah penting. Beberapa variabel yang ada dalam form survey calon *mustakhik* harus jelas dari mana tiap variabel ditentukan (asalnya). Bagaimana cara serta kenapa variabel tersebut dipilih harus dijelaskan secara jelas. Tentunya upaya ini harus terdokumentasikan secara jelas.

Selain itu, variabel keimanan yang terdapat pada indikator kedhuafaan perlu dikaji kembali. Upaya penanggulanagan kemiskinan merupakan upaya

yang meletakkan seluruh golongan tidak mampu menjadi bagian dari lingkup intervensi. Berdasarkan variabel keimanan yang meletakkan standart keimanan sebagai syarat *mustakhik* di Dompot Dhuafa, dapat menjadi sebuah *stereotif* atau memarjinalkan golongan miskin yang kurang mendapat bimbingan keagamaan. Oleh karena itu pengkajian variabel keimanan berkisar pada efektifitas penggunaan variabel tersebut terhadap upaya penanggulangan kemiskinan perlu dikaji kembali.

*Kedua;* untuk menambah diskursus pengembangan model indikator kemiskinan dari kalangan *non-Goverment* secara teoritis, untuk para akademisi penulis anjurkan untuk melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha menyibak dan mendeskripsikan indikator kedhuafaan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya penelitian dengan model studi kasus penerapan indikator kedhuafaan sangat perlu dilakukan. Penelitian studi kasus dilakukan dalam rangka melihat proses implementasi indikator kedhuafaan tersebut dari segi efektifitas. Upaya ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembanagan indikator kedhuafaan di Dompot Dhuafa Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

- Todaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi Di Negara-negara Dunia Ketiga*, terj. Burhanuddin Abdullah, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1994.
- Suyanto, Dr. Bagong, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*, Malang: In-Trans Publishing Wisma Kali Metro, 2013.
- Badan Pusat Statistik, *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial*, Jakarta: 2011.
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta: Sinar harapan, 1985.
- Santosa, Awan, *Ekonomi Kerakyatan: Urgensi, Konsep, Dan Aplikasi, Sebuah Mimpi Dan Peta Jalan Bagi Kemandirian Bangsa*, Yogyakarta: Sentra Ekonomi Kerakyatan, 2010.
- Kurniawan, Nanang Indra, *Globalisasi Dan Negara Kesejahteraan Perspektif Institutionalisme*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- Budi, Sulisty, *MDG's sebentar lagi, sanggupkah kita menghapus kemiskinan di Dunia?*, Jakarta: KOMPAS, 2010.
- Harttono, Hadikusumo, *Perangkap Kemiskinan: Problem Dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Badan Pusat Statistik, *Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan*, Jakarta Utara: BPS, 2007.



- Cahyat, Ade dkk., *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga (Sebuah Panduan Dengan Contoh Kutai Barat, Indonesia)*,Bogo Barat: Center For International Forestry Research, 2007.
- Suharto, Edi, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bahransyaf, Daud, *Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*, Yogyakarta: B2P3KS PRESS, 2012.
- Noer Effendi, Tadjuddin, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Badan pusat statistik, *Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan 2008*, Jakarta: Katalog BPS, 2008.
- Latief, Hilman, *Politik Filantropi Islam Indonesia*,Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan*, Yogyakarta:Madyan Press, 2002.
- H. Barkker, Anton, *Metode-metode filsafat*,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sugiyono, *Memahami metode penelitian kualitatif*, Bandung: alfabeta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Renika Cipta, 2005.

- Kasniyah, Nanik, *Tahapan Menentukan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- M. Ruane, Jonet, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Ariskunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990.
- Milles, B., dkk., *Analisis Data Kuntitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Qardawi, Dr. Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Penerbit Litera AntarNusa, 2009.
- Umar, H.M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007.
- Syafi'i, Imam, *Ar-Risalah*, Jakarta, Pustaka Firdaus:1992.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihawatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Smani, 1989.
- Khomsan, Ali, dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sholeh**, Maimun, "Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya", *Jurnal prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*, edisi ke-23, 2012.
- Cahyat, Ade, "Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Pengukuran Kemiskinan Di Indonesia)", *Governance Brief*, Bandung: Center for International Forestry Research, CIFOR: 2004).

- Supriyanto, Aji, *Rekayasa Informasi Penentuan Kemiskinan BPS Dengan Model Single-Criteria Dan Multi-Criteria*, Tesis, ISBN 978-602-17488-0-0, Bandung: Central Library Institute Technology Bandung, 2014.
- Lismawatie, Kurnia, *Korelasi Hitungan Indeks Pembangunan Manusia Dan Kondisi Kemiskinan Di Pematangsariantar*, Bandung: Central Library Institute Technology Bandung, 2007.
- Dewi, Endar Desri Kumala, *Studi Karakteristik Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antar Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dengan Indikator Utama IPM*, Tesis, nim: 15404044, Bandung: Regional and City Planning Study Programme, 2008.
- Syarifudin, Deden, *Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat Dan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia: Wilayah Studi Kabupaten Ciamis*, Tesis, nim. 24006027. Bandung: Development Studies, 2008
- Ritonga, Hamonangan, “Perkembangan Indikator Kemiskinan Dan Ketenagakerjaan Tahun 2004 Dan Prakiraan Tahun 2005-2006”, *Indeks Artikel Jurnal*, Jakarta: 2004.
- Budi Jati, Kuspradoto, *Pengaruh Indikator Ekonomi Makro regional terhadap kemiskinan absolut (1976-2002) studi kasus 26 provinsi*, UI-Thesis, Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2002.

- Ruspayandi, *Penskalaan Dimensi Ganda Dan Autokorelasi Spasial Ukuran Dan Indikator Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Profinsi Jawa Barat*. Skripsi, nim. G14101005, Bogor: Program Studi Statistika IPB, 2006.
- Pudjirahayu, Astututik, *Konsumsi Pangan Sebagai Indikator Kemiskinan*, Tesis, nim: NRP.97301. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB, 1999.
- Sukandar, Dadang dkk, “Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan”, *Jurnal Gizi dan Pangan*, no.3(2):94-100. Bogor: Jurnal Gizi Dan Pangan IPB, Juli 2008.
- Khomsan, Ali dkk, “Studi Indikator Kemiskinan Pada Masyarakat Dan Misklasifikasi Orang Miskin Menurut Kriteria BPS, Bank Dunia Dan Sajogyo”, *Jurnal Gizi dan Pangan*, Bogor: IPB, 2011.
- Kamil, Hidayatul, *Analisis Ukuran Kemiskinan Foster-Greer-Thorbecke Dari Sebaran Pendapatan Pareto Tipe 1*, Bogor: Departemen Matematika IPB, 2014.
- Meylani, Wina, *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Sebagai Modal Kerja Terhadap Indikator Kemiskinan Dan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus: Program Iktiar Di Desa Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan, Kab. Bogor, no:H14050860, 2009*, Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi IPB, 2009.

- Sunarti, MS, Dr. Euis, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*, ISBN no. 978-602-8665-05-6, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2006.
- Soraya, Neli, *Analisis Gerombol K-Means Dan K-Error Untuk Pengelompokan Desa-Desa Di Jawa Barat Berdasarkan Indikator Kemiskinan*, Bogor: Departemen Statistika IPB, 2009.
- Sumargo, Bagus, *Validitas Dan Reliabilitas Pengukuran Kemiskinan*, Bogor: Program Pasca Sarjana IPB, 2002.
- P.M., Laksono, *Indikator Kemiskinan Di Provinsi Maluku Dan Irian Jaya*, No. Klasifikasi: KKI, 362.5, Lak, i., Yogyakarta: Fakultas Sandra UGM, 1997.
- McDonald, Peter, dan Iwu Dwisetyani Utomo, *The 2010 Greater Jakarta Transition to Adulthood Survey Policy Background: Indikator Kemiskinan Pada Penduduk Muda Di JABATEK*, Australia: Australian National University, 2010.
- Cahyat, Ade, “Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Pengukuran Kemiskinan Di Indonesia)”, *Governance Brief*, Bandung: Center for International Forestry Research CIFOR, 2004.
- Natsir, Muhammad, “Indikator Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Jurusan Tata Niaga Universitas Politeknik Negeri Lhoksumawe*, 2013.
- Nurwati, Nunung, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan”, *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, Vol.10, No.1, Januari 2008.

- United Nation Development Program (UNDP), *Human Development Report, 1995*.
- UNDP, *Blue Print MDG's (Melenium Development Goals), 2000*.
- UNRISD, *Content and Measurements of the socioeconomic Development*, Geneva:  
United Nation Research On Social Development, 1970.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus penduduk,  
1960.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistika, 1960.
- Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2009 tentang  
koordinasi penanggulangan kemiskinan, 2009.
- Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013  
tentang Upah minimum, 2013.
- Priyono, Edi S.H., Akta Notaris SK.Menkeh dan HAM RI Lembaga Dompot Dhuafa,  
No. C-98-HT.03.02-2002, 2002.
- QS: At-taubah: 6
- Form Survey Calon Mustakhik Dompot Dhuafa Yogyakarta.*
- Suharto, Edi, *Potret Kemiskinan Dan Pembangunan Sosial Di Dunia*, Jurnal  
kebijakan 2010, [www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_37.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_37.htm), (diakses  
23 November 2015).
- Syauqi, Musthafa, *Fakir miskin*, majalah umat, [www.majulahijabi.org/artikel/fakir -  
miskin](http://www.majulahijabi.org/artikel/fakir-miskin), (diakses 4 Februari 2016).

Milenium Development Goals UNDP, *United Nation Declaration*. [www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg\\_goals.html](http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals.html), (diakses pada 24 Desember 2015).

Sustainable Development Goals (SDG's) UNDP, *what are Sustainable Goals?*, [www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015\\_development-agenda.html](http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015_development-agenda.html), (dikases 24 Desember 2015).

UNDP, *Human Development Index*, [www.hdrundp.org/en/content/human-development-index-hdi](http://www.hdrundp.org/en/content/human-development-index-hdi), (diakses 24 Desember 2015).

Badan Pusat Statistik, *Angka kemiskinan di Indonesia*, [www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494](http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494), (diakses 14 Desember 2015).

Badan Pusat Statistik, *Tentang BPS*, [www.bps.go.id/index.php/masterMenu/view/id/1#masterMenuTab4](http://www.bps.go.id/index.php/masterMenu/view/id/1#masterMenuTab4), (dikases 25 Maret 2015).

Widyakarya, *Widyakarya gizi dan pangan*, [www.wnpg.lipi.go.id](http://www.wnpg.lipi.go.id), (diakses 23 Desember 2015).

BKKBN, *Profil visi-misi dan target BKKBN*, [www.bkkbn.go.id/home.aspx](http://www.bkkbn.go.id/home.aspx), (diakses 22 November 2015).

Dompot Dhuafa, [Http://Djogja.Org/Program](http://Djogja.Org/Program), (diakses 10 Oktober 2015].

*Data Dituding Tak Valid, Ini Jawaban BPS*, [www.jawapos.com/read/2015/11/25/11718/-data-dituding-tak-valid-ini-jawaban-bps](http://www.jawapos.com/read/2015/11/25/11718/-data-dituding-tak-valid-ini-jawaban-bps). (diakses 1 Desember 2015).

Sinaga, Royke, *Universitas terbaik di Indonesia menurut Kemenristek Dikti*, [www. antaraneews.com/berita/513728/kemenristek-dikti-umumkan-peringkat-perguruan-tinggi-2015](http://www.antaraneews.com/berita/513728/kemenristek-dikti-umumkan-peringkat-perguruan-tinggi-2015). (diakses 29 November 2015).

ITB, *OPAK Institute Teknologi Bandung*, <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=search>, (diakses 29 November 2015).

Universitas Indonesia, *OPAK UI*, <http://www.lib.ui.ac.id/hasilcari.jsp?lokasi=lokal&query=indikator+kemiskinan>, (diakses 29 November 2015).

Institute Teknologi Bandung, *OPAK IPB*, <http://repository.ipb.ac.id/discover?scope=%2F&query=indikator+kemiskinan&submit>, (diakses 29 November 2015).

UGM, *OPAK Universitas Gadjah Mada (UGM)*, <http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&self=1&op=opac>. (diakses 29 November 2015).

UNPAD, *OPAK Universitas Padjajaran (UNPAD)*, <https://cisral.unpad.ac.id/?s=indicator+kemiskinan>, (diakses 29 November 2015).

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *OPAK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, [www.opac.uin.suka.ac.id/](http://www.opac.uin.suka.ac.id/), (diakses 29 November 2015).

*Filantropi*, [www.id.m.wikipedia.org/wiki/filantropi](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/filantropi), (diakses 4 April 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Badan Pusat Statistik, *Sekilas Mengenai Survei Pengupahan Buruh*, [www.bps.go.id/Subjek/view/id/19](http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/19), (diakses 24 Februari 2015).



Maruto, Dikto, *Sistem Baru Pengupahan Berdasarkan UMP dan Inflansi Diterapkan 2016*, [www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2015/10/15/346161/sistem-baru-pengupahan-berdasarkan-ump-dan-inflansi-diterapkan-2016](http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2015/10/15/346161/sistem-baru-pengupahan-berdasarkan-ump-dan-inflansi-diterapkan-2016), (diakses 1 Maret 2016).

